



## Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap *good governance* pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan

Erliyanti<sup>1</sup>, Rahma Yuliani<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lambung Mangkurat

<sup>1</sup>[erliy.hlg@gmail.com](mailto:erliy.hlg@gmail.com), <sup>2</sup>[rahmayuliantii@gmail.com](mailto:rahmayuliantii@gmail.com), <sup>3</sup>[hamdani1001@gmail.com](mailto:hamdani1001@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 17 April 2022

Disetujui 15 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

### Kata kunci:

Kompetensi aparatur pemerintah; Partisipasi masyarakat; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Gaya kepemimpinan; *Good governance*

### Keywords :

*Government apparatus competence; Community participation; Government Internal Control System (SPIP); Leadership style; Good governance*

### ABSTRAK

Pelaksanaan *good governance* sangat penting sehingga ada beberapa variabel yang mempunyai pengaruh kuat terhadap *good governance*. Penelitian ini menguji pengaruh (1) kompetensi aparatur pemerintah terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan, (2) partisipasi masyarakat terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan, (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan, (4) gaya Kepemimpinan terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bidang keuangan pada 41 SKPD di Kabupaten Balangan dan auditor Kabupaten Balangan yang berjumlah 287 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 138 orang yaitu 123 orang dari 3 responden pada masing-masing SKPD dan untuk auditor berjumlah 15 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data adalah dengan angket (kuesioner). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan SPSS versi 25. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Sedangkan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan.

### ABSTRACT

*The implementation of good governance is very important that there are several variables that have a strong influence on good governance. This study examines the influence of (1) the relationship between government apparatus competence on good governance in financial management of the SKPD Kabupaten Balangan, (2) the relationship between public participation on good governance in financial management of the SKPD Kabupaten Balangan, (3) the relationship between Government Internal Control System (SPIP) on good governance in in financial management of the SKPD Kabupaten Balangan, and (4) the relationship between leadership style on good governance in financial management of the SKPD Kabupaten Balangan. The population in this study were employees in the financial sectore at 41 SKPD in SKPD Kabupaten Balangan and auditor in Kabupaten Balangan, numbering 287 people. While the sample size were 138 persons, including 123 people from three respondents in each SKPD and 15 people from auditor. The sampling technique used was purposive sampling. The method of collection data is based on questionnaire (questionnaire). Data analysis technique used are multiple regression analysis and SPSS version 25. The analysis found that government apparatus competency, community participation, and the government's internal control system (SPIP) have positive effect on good governance in financial management of the SKPD Kabupaten Balangan. Meanwhile, the leadership style has no effect on good governance in in financial management of the SKPD Kabupaten Balangan.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia menekankan adanya upaya memprioritaskan reformasi yudisial, penguatan pengelolaan keuangan publik dan program antikorupsi, lewat program dukungan terhadap reformasi sektor peradilan di Indonesia (*Support to the Justice Sector Reform Programme in Indonesia/SUSTAIN*). Tujuan adanya tata kelola pemerintah yang baik yaitu untuk memperkuat integritas organisasional, akuntabilitas, transparansi dan memperkuat sistem pelatihan penegak hukum di Indonesia. Dalam hal mendukung penguatan administrasi pemerintah dan

pengelolaan keuangan yang baik, termasuk di tingkat daerah, meningkatnya transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan tentunya akan memperkuat kepercayaan publik bahwa pendapatan pajak dikumpulkan dan dibelanjakan secara efektif (Moenek & Suwanda, 2019).

Pemerintah telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintah (*good governance*) dengan mengeluarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu pemerintah menetapkan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, dimuat asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; dan (7) asas akuntabilitas. Kedua peraturan ini merupakan langkah awal reformasi di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Republik Indonesia, 1999).

Penerapan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah umumnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat digunakan untuk mengurangi penyelewengan dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan daerah. Menurut (Pazri, 2016) menyebutkan bahwa penerapan *good governance* juga dapat digunakan sebagai pemenuhan tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Selain itu, manfaat lain dengan adanya penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menciptakan kepatuhan pemerintahan daerah terhadap hukum diantaranya adalah kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi *good governance*. Kompetensi merupakan keahlian dan kemampuan seseorang yang berdampak secara langsung pada kinerjanya (Sedarmayanti, 2013). Adapun peningkatan kompetensi aparatur pemerintah diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi kerja organisasi. Tujuan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi termasuk kemampuan, pengabdian, disiplin, keteladanan dan kemampuan dalam melayani serta tanggap pada kepentingan masyarakat. Konsep kompetensi aparatur pemerintah sangat berperan penting dalam *good governance*, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam organisasi merupakan tugas penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Martin, 2002). Semakin baik kompetensi aparatur pemerintah, maka akan semakin dapat terwujudnya *good governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Wafa et al., (2020) dan Helmayani et al., (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afandi et al., (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Partisipasi masyarakat merupakan variabel berikutnya yang dapat mempengaruhi *good governance*. Partisipasi menggambarkan demokrasi dalam pola desentralisasi yang melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan dan pembangunan (Tilaar, 2009). Dengan adanya partisipasi masyarakat yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan transparansi pembangunan yang sesuai dengan hukum, sehingga menciptakan *good governance* (Waheduzzaman & As-Saber, 2015). Pada umumnya, penerapan *good governance* menuntut partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan pengendalian pemerintah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafa et al., (2020) dan Helmayani et al., (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi et al., (2016) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap *Good Governance*.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi *good governance*. Untuk dapat mewujudkan *good governance* maka dapat diimbangi dengan pengendalian internal yang optimal. Aktivitas pemerintah yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan dari pengendalian internal. Selain itu, tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wafa et al., (2020), Satria (2019), Ayub et al., (2018) dan Kristiana et al., (2017) yang menunjukkan bahwa bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty & Hernando (2020) menunjukkan bahwa Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.

Gaya kepemimpinan merupakan variabel yang juga dapat mempengaruhi *good governance*. Penerapan *good governance* tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab seorang pimpinan melalui gaya kepemimpinan yang digunakan dalam organisasi (Haryanti, 2005). Perilaku pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya kepemimpinan seseorang. Gaya kepemimpinan berdampak langsung pada produktivitas aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Satria (2019) dan Susilo et al., (2019) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

Penerapan *good governance* di Indonesia maupun daerah belum dijalankan secara maksimal hal ini dikarenakan masih banyak terdapat penyelewengan korupsi. Laporan dari *Transparency International tentang Corruption perception index* tahun 2019, Indonesia menempati ranking 85 dari 180 Negara, dengan skor 40 dari skala 100. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia (Transparency International, 2019). Menurut Laporan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2019, terdapat 7.903 laporan (tujuh ribu sembilan ratus tiga) laporan masyarakat tahun 2019, sebanyak 41,62 persen /3.289 (tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan) laporan, merasa tidak puas dengan pelayanan publik di pemerintahan daerah (Ombudsman Republik Indonesia, 2019). *Indonesia Corruption Watch* juga menyebut bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah (PEMDA) menjadi pelaku tindak pidana korupsi terbanyak sepanjang 2019 yaitu 263 orang (Arigi, 2020). Sedangkan, menurut laporan dari *Indeks good governance Indonesia* (IGI) tahun 2016, Provinsi Kalimantan Selatan berada di urutan ke 23 dari 33 Provinsi (Hidayat, 2016). Data ini mencerminkan masih belum maksimalnya penerapan *good governance* pada Provinsi Kalimantan Selatan.

Penerapan *good governance* di Kabupaten Balangan telah memenuhi prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, proporsionalitas dan profesionalisme. Namun prinsip keterbukaan dan akuntabilitas belum maksimal diterapkan. Hal ini dapat dilihat masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Balangan diantaranya adalah laporan keuangan daerah yang tidak dipublikasikan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses laporan tersebut dan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Balangan, hanya terdapat RKA yang publikasinya tidak rutin setiap tahun, hal ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan dan akuntabilitas dari Pemerintah Daerah. Asas dari *good governance* adalah yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme menjelaskan bahwa prinsip keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan akuntabilitas yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 1999). Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas, diharapkan masyarakat bisa melakukan *social control* dan memberikan *feed back*.

Masalah lain yang terjadi di Kabupaten Balangan adalah aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi rendah dan tidak sesuai dengan bidangnya. , masih banyak pegawai di bidang keuangan yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan posisinya yaitu bukan dari ekonomi/akuntansi, khususnya untuk pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran seharusnya dijabat oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi. Dalam tabel diatas pejabat penatausahaan keuangan yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi hanya 6 pegawai dari 41 pegawai, sedangkan bendahara pengeluaran yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi terdiri dari 5 pegawai dari 41 pegawai. Hal ini, akan menyebabkan para pegawai tersebut kurang memiliki kompetensi di bidang keuangan yang berakibat pada terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

Beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Balangan adalah Sistem merit dan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen

ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kecacatan. Sistem merit merupakan suatu bentuk apresiasi dari instansi kepada ASN atas hasil kerja yang baik dan memuaskan. Sistem ini dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat perilaku nepotisme dan spoils system dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Adapun prinsip dari sistem merit antara lain perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, tujuan perekrutan adalah mencari talenta terbaik, pengembangan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja, penilaian kerja berkelanjutan, promosi yang dinamis, apresiasi layak melalui sistem pensiun dan sistem kompensasi. Berdasarkan penilaian mandiri sistem merit di Kabupaten Balangan tahun 2020 dengan nilai 257 atau dengan kategori baik karena berada direntang 250-324. Walaupun sudah berada dikategori baik namun pencapaian belumlah optimal hingga kategori sangat baik dengan nilai rentang 325-400. Kategori baik menggambarkan perlunya diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari talent pool dengan persyaratan tertentu dan pengawasan untuk mengatasi terjadinya spoil system.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 bahwa komposisi persentase tiap dimensi dalam pengukuran IP-ASN adalah kualifikasi pendidikan (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), kedisiplinan (5%). Sedangkan untuk rentang (range) nilai dalam pengkategorian IP-ASN terbagi dalam sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (di bawah 60). Berdasarkan hasil pengukuran, IP-ASN Kabupaten Balangan pada tahun 2019 adalah 62,35% dan mengalami peningkatan menjadi 67,06% pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IP-ASN Kabupaten Balangan walaupun terjadi peningkatan namun masih termasuk dalam kategori rendah. Dimensi kompetensi menjadi salah satu kontributor yang menyebabkan rendahnya IP-ASN Kabupaten Balangan. Dimensi tersebut memiliki capaian 19,75% pada tahun 2019 atau termasuk kategori sangat rendah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 24,05%, namun masih termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya capaian dimensi kompetensi tersebut menjadi pertanda adanya masalah dalam pengembangan kompetensi SDM aparatur yang ditempuh pemerintah daerah selama ini.

Kemudian, masalah lainnya berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terkait dalam proses perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sangat tinggi, peneliti melihat masyarakat aktif memberikan kritik dan saran saat dilakukan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), namun berbeda pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan, tingkat partisipasi yang terlihat menurun karena masyarakat sudah kurang respon terhadap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), bahkan menurut masyarakat bahwa mereka yang datang ke pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan semata-mata untuk mengkritik pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang hanya sebagai formalitas di dalam pelaksanaannya karena hasil yang didapatkan juga nantinya akan berbeda dengan usulan yang diberikan.

Masalah yang terjadi pada Kabupaten Balangan adalah sebagian SKPD tidak menjalankan sistem pengendalian internal sesuai SOP yang berlaku dan penguatan pengawasan belum optimal. Hal ini dapat dilihat, dari sebagian pegawai bidang keuangan SKPD Kabupaten Balangan tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya adalah Bendahara pengeluaran yang bertugas membuat SPM (surat perintah membayar), padahal seharusnya tugas tersebut dilakukan oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan). Kemudian contoh berikutnya adalah laporan keuangan seharusnya dibuat oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan), tetapi laporan keuangan masih dibuat oleh bendahara pada sebagian SKPD di Kabupaten Balangan.

Kabupaten Balangan terpilih sebagai kabupaten sangat inovatif pada penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020. Kabupaten Balangan menerima penghargaan kategori ke-2 “Kabupaten Sangat Inovatif” bersama 8 Kabupaten lainnya di Indonesia diantaranya Kabupaten Banyuwangi, Ogan Ilir, Sambas, Garut, Solok, Kubu Raya dan Kabupaten Ponorogo. IGA adalah lomba inovasi daerah yang dilaksanakan kemendagri dalam rangka memacu tumbuh kembangnya iklim berinovasi di daerah (apahabar.com, 2020). Pencapaian tersebut, didukung oleh berbagai pihak, tidak terkecuali pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan. Menurut penelitian Lestari (2012)

mendefinisikan gaya kepemimpinan adalah pola khas perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin saat berhadapan dengan anggota kelompok (Dubrin, 2005).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penambahan variabel gaya kepemimpinan. Alasan penambahan variabel gaya pemimpin adalah karena pemimpin memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam penerapan *Good Governance*. Kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi ujung tombak keberhasilan tujuan pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi ditentukan oleh keberadaan seorang pemimpin didalamnya, dengan berbagai karakter yang melekat dan tanggung jawab yang dipikulnya, menuntut pemimpin lebih agresif dalam berinovasi dan berkontribusi terhadap proses perubahan yang diharapkan. Dalam mewujudkan pelayanan prima, seorang pemimpin harus berani melakukan perubahan. Karena itu diperlukan pemimpin yang mampu sebagai agen perubahan. Disini jelas adanya peran pemimpin sebagai agen perubahan yang akan mengarahkan bawahannya untuk berkinerja tinggi dan meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat serta mewujudkan *Good Governance*. Selain itu, objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan tahun penelitian yaitu 2020.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal (*Causal Research*). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bidang keuangan pada 41 SKPD di Kabupaten Balangan dan auditor Kabupaten Balangan yang berjumlah 287 orang yang terdiri dari 15 auditor dan 272 pegawai bidang keuangan (230 pegawai berstatus PNS dan 42 pegawai berstatus honorer). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu :

1. Pegawai bidang keuangan yang bersatus Pegawai Negeri Sipil
2. Pegawai bidang keuangan yang menjabat sebagai Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran
3. Auditor Kabupaten Balangan

Sampel penelitian untuk pegawai bidang keuangan adalah pegawai yang berstatus PNS yang berjumlah 230 orang, namun terdapat kriteria lainnya yaitu hanya menjabat sebagai Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Maka, pada setiap SKPD hanya 3 orang yang dijadikan sampel yaitu pegawai yang berstatus PNS dan memiliki jabatan sebagai Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Total SKPD di kabupaten balangan adalah 41 SKPD, sehingga sampel pada penelitian untuk pegawai bidang keuangan adalah berjumlah 123 orang (41 SKPD x 3 orang). Sampel penelitian untuk auditor adalah pegawai auditor yang berstatus PNS. Seluruh auditor telah berstatus PNS sehingga sampel penelitian untuk auditor adalah 15 orang atau seluruh populasi auditor. Total seluruh sampel penelitian yang terdiri dari pegawai keuangan SKPD dan auditor adalah 138 orang. Pengolahan data untuk menguji empat hipotesis pada penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan dikuantitatifkan dengan skala likert terlebih dahulu agar dapat memperoleh angka yang dapat dimasukkan dalam aplikasi software program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Pemerintah	135	13	40	33.19	4.585
Partisipasi Masyarakat	135	9	30	23.44	3.426
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	135	24	45	37.17	3.699
Gaya Kepemimpinan	135	14	30	22.96	3.249
<i>Good Governance</i>	135	17	30	24.74	2.501
Valid N (listwise)	135				

Sumber : Olah data SPSS

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa : 1) Jumlah responden (n) dalam penelitian ini adalah sebanyak 135 responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran pada 41 SKPD dan auditor intern di Kabupaten Balangan; 2) Variabel independen berupa Kompetensi Aparatur Pemerintah ( $X_1$ ) yang memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 40. Mean dari variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah sebesar 33,19 dan standar deviasi 4,585; 3) Variabel independen berupa Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) yang memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 30. Mean dari variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 23,44 dan standar deviasi 3,426; 4) Variabel independen berupa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ( $X_3$ ) yang memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 45. Mean dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 37,17 dan standar deviasi 3,699; 5) Variabel independen berupa Gaya Kepemimpinan ( $X_4$ ) yang memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 30. Mean dari variabel Gaya Kepemimpinan sebesar 22,96 dan standar deviasi 3,249; 6) Variabel dependen berupa *Good governance* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 30. Mean dari variabel *Good governance* sebesar 24,74 dan standar deviasi 2,501.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### Uji Validitas

**Tabel 2 Uji Validitas Kompetensi Aparatur Pemerintah**

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,759	0,361	Valid
2	0,713	0,361	Valid
3	0,803	0,361	Valid
4	0,791	0,361	Valid
5	0,834	0,361	Valid
6	0,848	0,361	Valid
7	0,689	0,361	Valid
8	0,429	0,361	Valid

Sumber : Olah data

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertanyaan untuk Kompetensi Aparatur Pemerintah nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R hitung dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 8 adalah 0,759, 0,713, 0,803, 0,791, 0,834, 0,848, 0,689, dan 0,429, sedangkan pada R tabel adalah 0,361. Oleh karena itu, untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah dinyatakan valid.

**Tabel 3 Uji Validitas Partisipasi Masyarakat**

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,727	0,361	Valid
2	0,672	0,361	Valid
3	0,731	0,361	Valid
4	0,828	0,361	Valid
5	0,538	0,361	Valid
6	0,760	0,361	Valid

Sumber : Olah data

Tabel 3 menunjukkan bahwa pertanyaan untuk Partisipasi Masyarakat nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R hitung dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 6 adalah 0,727, 0,672, 0,731, 0,828, 0,538 dan 0,760 sedangkan pada R tabel adalah 0,361, sehingga pertanyaan untuk variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan valid.

**Tabel 4 Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,657	0,361	Valid
2	0,763	0,361	Valid
3	0,440	0,361	Valid
4	0,752	0,361	Valid
5	0,665	0,361	Valid
6	0,636	0,361	Valid
7	0,646	0,361	Valid
8	0,806	0,361	Valid
9	0,713	0,361	Valid

Sumber : Olah data

Tabel 4 menunjukkan bahwa pertanyaan untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R hitung dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 9 adalah 0,657, 0,763, 0,440, 0,752, 0,665, 0,636, 0,646, 0,806 dan 0,713 sedangkan pada R tabel adalah 0,361, sehingga pertanyaan untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan valid.

**Tabel 5 Uji Validitas Gaya Kepemimpinan**

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,642	0,361	Valid
2	0,565	0,361	Valid
3	0,534	0,361	Valid
4	0,612	0,361	Valid
5	0,669	0,361	Valid
6	0,751	0,361	Valid

Sumber : olah data

Tabel 5 menunjukkan bahwa pertanyaan untuk Gaya Kepemimpinan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R hitung dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 6 adalah 0,642, 0,565, 0,534, 0,612, 0,669 dan 0,751 sedangkan pada R tabel adalah 0,361, sehingga pertanyaan untuk variabel Gaya Kepemimpinan dinyatakan valid.

**Tabel 6 Uji Validitas Good Governance**

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,840	0,361	Valid
2	0,834	0,361	Valid
3	0,783	0,361	Valid
4	0,768	0,361	Valid
5	0,706	0,361	Valid
6	0,659	0,361	Valid

Sumber : Olah data

Tabel 6 menunjukkan bahwa pertanyaan untuk *Good governance* nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R hitung dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 6 adalah 0,840, 0,834, 0,783, 0,768, 0,706 dan 0,659 sedangkan pada R tabel adalah 0,361, sehingga pertanyaan untuk variabel *Good governance* dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha Cronbach	Reliability
Kompetensi Aparatur Pemerintah ( $X_1$ )	0,878	Reliabel
Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ )	0,806	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_3$ )	0,850	Reliabel
Gaya Kepemimpinan ( $X_4$ )	0,869	Reliabel
<i>Good governance</i> (Y)	0,804	Reliabel

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa hasil *Chronbach Alpha* dari semua variabel lebih dari 0,70. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Chronbach Alpha* dari variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah ( $X_1$ ) sebesar 0,878, variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) sebesar 0,806, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_3$ ) sebesar 0,850, variabel Gaya Kepemimpinan ( $X_4$ ) sebesar 0,869, sedangkan variabel *Good governance* (Y) sebesar 0,804. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan tersebut dinyatakan dapat dipercaya atau reliabel sebagai alat ukur variabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 8 Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	<i>Asymp. Sig. (2-tailed) &gt; 0,05</i>	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,281	Data Terdistribusi Normal

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah 0,281 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini terdistribusi secara normal sehingga menunjukkan syarat model regresi sudah memenuhi syarat normalitas.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 9 Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance > 0,10	VIF < 10	Kesimpulan
Kompetensi Aparatur Pemerintah ( $X_1$ )	0,419	2,387	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ )	0,364	2,745	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_3$ )	0,413	2,420	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Gaya Kepemimpinan ( $X_4$ )	0,874	1,145	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Olah data

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah ( $X_1$ ) yang dilihat pada nilai *tolerance* sebesar 0,419 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,387 < 10, variabel Partisipasi Masyarakat ( $X_2$ ) yang dilihat pada nilai *tolerance* sebesar 0,364 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,745 < 10, variabel Sistem Pengendalian Intern (SPIP) ( $X_3$ ) yang dilihat pada nilai *tolerance* sebesar 0,413 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,420 < 10, dan variabel Gaya Kepemimpinan ( $X_4$ ) yang dilihat pada nilai *tolerance* sebesar 0,874 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,145 < 10, sehingga pengujian tersebut menyatakan bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.



## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 10 Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig > 0,05	Kesimpulan
Kompetensi Aparatur Pemerintah (X <sub>1</sub> )	0,857	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat (X <sub>2</sub> )	0,866	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X <sub>3</sub> )	0,917	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Gaya Kepemimpinan (X <sub>4</sub> )	0,352	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa variabel penelitian bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan tingkat signifikansi variabel bebas di atas tingkat kepercayaan 5%.

## Uji Fit Model

### Uji Kelayakan Model

**Tabel 11 Hasil Uji F**

F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Signifikansi
68,441	2,44	0,00

Nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F<sub>hitung</sub> pada tabel 11, sebesar 68,441 > F<sub>tabel</sub> sebesar 2,44 dan signifikansi 0,00 < 0,05. Artinya model regresi dinyatakan signifikan dan dapat digunakan.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<i>Adjusted R Square</i>	0,668
--------------------------	-------

Berdasarkan tabel 12 di atas menunjukkan besarnya nilai *adjusted R square* adalah 0,668 yang artinya 66,80% variasi *good governance* dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 33,20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis (Uji T)

**Tabel 13 Hasil Analisis Uji T**

No	Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Sig	Kesimpulan
1.	Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap <i>Good Governance</i> .	3,043	1,978	0,003	Hipotesis diterima
2.	Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap <i>Good Governance</i> .	2,405	1,978	0,018	Hipotesis diterima
3.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap <i>Good Governance</i> .	5,923	1,978	0,000	Hipotesis diterima
4.	Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap <i>Good Governance</i> .	0,887	1,978	0,377	Hipotesis ditolak

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa: a) Uji antara Kompetensi Aparatur Pemerintah dengan *Good governance* yang merupakan hipotesis pertama ( $H_1$ ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 ( $0,003 < 0,05$ ) dan menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar  $3,043 > 1,978$ , yang berarti bahwa  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap *Good governance*; b) Uji antara Partisipasi Masyarakat dengan *Good governance* yang merupakan hipotesis kedua ( $H_2$ ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 ( $0,018 < 0,05$ ) dan menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,405 > 1,978$ , yang berarti bahwa  $H_2$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap *Good Governance*; c) Uji antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan *Good governance* yang merupakan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) dan menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar  $5,923 > 1,978$ , yang berarti bahwa  $H_3$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap *Good Governance*; d) Uji antara Penerapan Gaya Kepemimpinan dengan *Good governance* yang merupakan hipotesis keempat ( $H_4$ ) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,377 ( $0,377 > 0,05$ ) dan menunjukkan nilai  $t$  hitung sebesar  $0,887 < 1,978$ , yang berarti bahwa  $H_4$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *Good Governance*.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan**

Secara statistik menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dengan tingkat signifikansi 0,05. Variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$   $3,043 > 1,978$  dan signifikansi  $0,003 < 0,05$ . Nilai (+) positif pada  $t_{hitung}$  menunjukkan arah hubungan positif yang berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada kompetensi aparatur pemerintah akan berdampak pada peningkatan *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan demikian pula sebaliknya.

Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan kompetensi aparatur pemerintah sangat diperlukan dalam pemerintahan agar pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kompetensi aparatur pemerintah tidak cukup diukur dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan tetapi diukur dengan perilaku dalam bekerja. Dalam hal ini seorang aparatur pemerintah dikatakan kompeten apabila dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan harus dikelola berdasarkan asas-asas diantaranya transparan dan akuntabel. Kompetensi aparatur pemerintah yang baik akan mendukung pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban sehingga dana yang dikelola dapat dialokasikan dengan benar, tepat waktu, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, jika kompetensi aparatur pemerintah rendah maka akan menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi terhambat mulai dari tahap penyusunan anggaran sehingga tahap laporan pertanggungjawaban pun akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan aparatur pemerintah yang kompeten dibidangnya dan mempunyai pengalaman yang cukup agar pengelolaan keuangan dapat digunakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran serta dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, kompetensi aparatur pemerintah akan selalu menjadi elemen penting bagi organisasi karena akan menentukan kearah mana organisasi tersebut berjalan dan sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan *good governance*. Menurut Martin (2002) konsep kompetensi sangat berperan penting dalam tata kelola. Keberhasilan *good governance* dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah yang turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yaitu Wafa et al., (2020) dan Helmayani et al., (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afandi et al., (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

## **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap *Good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan**

Partisipasi masyarakat secara statistik berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Variabel partisipasi masyarakat memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,018 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,40. Nilai (+) positif pada  $t_{hitung}$  menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus antara partisipasi masyarakat dengan *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan yang artinya jika partisipasi masyarakat meningkat maka akan meningkatkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan begitu pula sebaliknya. Partisipasi masyarakat memiliki signifikansi  $0,018 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$   $2,405 > 1,978$ .

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka diharapkan seluruh dana untuk pengelolaan di Kabupaten Balangan dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para pemerintah bersama elit-elit tertentu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Waheduzzaman & As-Saber (2015) mengatakan partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan menurut Raharja (2015) menyebutkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafa et al., (2020) dan Helmayani et al., (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi et al., (2016) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap *Good Governance*.

## **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$   $5,923 > 1,978$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai (+) positif pada  $t_{hitung}$  menunjukkan adanya hubungan yang positif yaitu ketika SPIP mengalami peningkatan maka *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan demikian pula sebaliknya Hasil pengujian regresi linear menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara statistik berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan pada tingkat signifikansi 0,05.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan pengendalian intern dikatakan efektif jika organisasi telah melaksanakan dan menerapkan lima elemen yang membangun pengendalian yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Sementara itu jika dikaitkan dengan prinsip *Good governance* (wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas) maka terdapat kesesuaian antara elemen yang membangun pengendalian intern tersebut. Dukungan SPIP yang baik akan memberikan jaminan bahwa organisasi perangkat daerah telah berkinerja melaksanakan program/kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Arens (2004) dengan pengendalian intern yang efektif maka akan mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Wafa et al., (2020), Satria (2019), Ayub et al., (2018) dan Kristiana et al., (2017) yang menunjukkan bahwa bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty & Hernando (2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.

## **Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap *Good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan**

Hasil pengujian regresi linear menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan secara statistik tidak berpengaruh terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. Hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan memiliki signifikansi  $0,377 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$   $0,887 < 1,978$ . Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan SKPD Kabupaten Balangan mempunyai tupoksi dan prosedur kerja yang jelas. Artinya, setiap anggota organisasi termasuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara Pengeluaran dapat bekerja secara mandiri berdasarkan SOP ataupun tupoksi yang telah ada. SOP dan tupoksi menjadi pedoman karyawan dalam bertindak dan dengan adanya SOP dan tupoksi organisasi dapat memastikan suatu aktivitas seperti pengelolaan keuangan bisa berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria (2019) dan Susilo et al., (2019) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten dibidangnya dan mempunyai pengalaman yang cukup agar pengelolaan keuangan dapat digunakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran serta dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, kompetensi aparatur pemerintah akan selalu menjadi elemen penting bagi organisasi karena akan menentukan kearah mana organisasi tersebut berjalan dan sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan *good governance*; Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka diharapkan seluruh dana untuk pengelolaan di Kabupaten Balangan dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para pemerintah bersama elit-elit tertentu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan dengan adanya dukungan SPIP yang baik akan memberikan jaminan bahwa organisasi perangkat daerah telah berkinerja melaksanakan program/kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *good governance* dalam pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan dikarenakan signifikansi  $0,377 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$   $0,887 < 1,978$ . Selain itu juga, dikarenakan SKPD Kabupaten Balangan mempunyai tupoksi yang jelas untuk seluruh pegawai bekerja sesuai tupoksi masing-masing sehingga Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara Pengeluaran dapat bekerja secara mandiri berdasarkan SOP ataupun tupoksi yang telah ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, P., Chandrarin, G., & Subiyantoro, E. (2019). Village funding program performance: good governance and human resources competence bancak district, semarang municipal indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 882–886.
- apahabar.com. (2020, December 18). *Penghargaan IGA 2020, Balangan Terpilih Sebagai Kabupaten Sangat Inovatif* - apahabar.com. Apahabar.Com. <https://apahabar.com/2020/12/penghargaan-iga-2020-balangan-terpilih-sebagai-kabupaten-sangat-inovatif/>
- Arigi, F. (2020, April 19). *ICW Catat PNS Pemda Terbanyak Korupsi Sepanjang 2019*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1333239/icw-catat-pns-pemda-terbanyak-korupsi-sepanjang-2019>

- Ayub, R. D., Suyana Utama, M., & Wardana, I. G. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 987–1022. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p03>
- Helmayani, P. L., Sulindawati, N. L. G. E., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi pada Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2020). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention ( Study at the Regional Government of Jambi ). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118.
- Hidayat, L. (2016, November 24). *Membangun Proses Kebijakan Publik yang Sinergis dan Berbasis Data by Lenny Lenny*. Prezi.Com. <https://prezi.com/eidz7ncusbmb/membangun-proses-kebijakan-publik-yang-sinergis-dan-berbasis-data/>
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>
- Kristiana, W. L., Wahyuni, M. A., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Sukasada). *E-Journal S1 Ak Program Pendidikan Akuntansi Universitas Ganesha*, 7(1), 1–12.
- Lestari, V. S. (2012). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Universitas Siliwangi*.
- Martin, J. (2002). *Auditing And Financial Of Company*. John Wiley and Sons.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan 2019*.
- Pazri, M. (2016). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Badamai Law Journal*, 1(2), 259–280. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1822.g1594>
- Raharja. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Organisasi (pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dpr.go.id 1 (1999).
- Satria, C. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 4(1), 125–135. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.577>
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama.
- Susilo, D. E., Soetjipto, N., Triwulan, A. B., Atnaningtyas, D., Riswanto, A., Wasis, W., & Jaya, F. P. (2019). The effect of employee commitment, culture, and leadership style on good governance performance of Jombang District government (Indonesia). *Espacios*, 40(27).

Transparency International. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*. Transparency.Org.  
<https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl#>

Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ( Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan ). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 68–82.

Waheduzzaman, W., & As-Saber, S. (2015). Community participation and local governance in Bangladesh. *Australian Journal Political Science*, 50(1), 128–147.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/10361146.2014.989194>